

ISLAMISME DAN DEMOKRATISASI DI INDOENSIA PASCA REFORMASI:ANALISIS SOSIO-POLITIK

Syahrir Karim

Samsu Adabi Mamat

Jurusan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: syahrirkarim@gmail.com

Political Science Programme

School of History, Politics and Strategy Studies

The National University of Malaysia

Abstrak

Dalam beberapa pemikiran terbaru, setidaknya ada tiga pandangan yang mencoba memecahkan masalah dikotomi antara agama (Islam) dan Negara. Pertama, Islam dan Negara adalah *integreted* (bersatu), tak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi. *Kedua*, Islam dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Intinya adalah bahwa Islam memerlukan negara karena dengan negara, Islam dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama (Islam) agar dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Ketiga, hubungan Islam dan negara bersifat sekularistik. Pandangan ini menolak sama sekali pendasaran negara kepada Islam, atau setidaknya menolak determinasi Islam atas bentuk negara. Di kalangan muslim, pemrakarsa pandangan ini antara lain adalah Ali Abd Al-Raziq. Ketiga pandangan tentang hubungan Islam dan negara ini dapat dipakai untuk melihat perkembangan persepsi umat Islam terhadap negara dan sebaliknya. Secara umum pandangan-pandangan yang ada di atas tersebar dalam berbagai aliran atau pemikiran yang ada di Indonesia, baik yang bersifat gerakan (Islam-Islamisme) atau wujud lain yang sangat berpengaruh dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Key words: *Islamisme, Demokratisasi dan Gerakan Islam*

I. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, gelombang kebangkitan Islam dengan fenomena gerakan modern (pembaruan) dan upaya menghadapi penetrasi Barat dengan fenomena modernisasi dan negara-bangsa-nya telah terjadi di Indonesia.¹ Terutama sejak awal abad ke-20 seluruh dunia Islam sedang gencar berupaya melepaskan diri dari penjajahan asing. Di Indonesia, umat Islam sedang berjuang melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Tercatat bahwa sampai akhir abad ke-19,

pola gerakan Islam di Indonesia masih bersifat komunal.² Pola perjuangan seperti ini menggunakan solidaritas mekanis, dengan kepemimpinan yang kharismatis dan paternal, tidak terstruktur, dan biasanya berbasis pedesaan (masyarakat agraris).

Tetapi dalam catatan sejarah, bahwa sejak awal abad ke-20 gerakan Islam tidak lagi memakai pola komunal, tetapi memakai pola yang disebut Kuntowijoyo pola asosiasional.³ Awal perkembangannya ditandai oleh berdirinya Syarikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam yang lebih berorientasi politik. Sedangkan dalam arti kelembagaan nonpolitik, gerakan Islam pertama yang berbentuk organisasi adalah Muhammadiyah dan Persatuan Islam yang sering dianggap sebagai kaum modernis, serta organisasi Nahdatul Ulama (NU) yang dianggap berbasis golongan tradisional.⁴ Pola perjuangan seperti ini didasarkan pada solidaritas organis dengan corak kepemimpinan yang tidak lagi paternalistik, tetapi lebih demokratis.

Fenomena diatas adalah bagian dari sebuah ekspresi para pemeluk Islam, Islam sering tampil tidak hanya sebagai ajaran tetapi juga ideologi (gerakan sosial yang berbasis ideologi). Hal ini berangkat dari sebuah pandangan politik-keagamaan yang merujuk pada proposisi: *inna al-Islam ad-din wa ad-dawlah*, bahwa Islam itu agama dan negara.⁵ Meskipun dalam perkembangannya, pernyataan bahwa Islam sebagai sebuah ideologi masih menuai kontroversi, namun dalam kenyataannya di sebahagian lingkungan Muslim masih terdapat gerakan atau pemikiran yang menjadikan Islam sebagai ideologi. Kontroversi tersebut dapat dipahami mengingat konsep ideologi itu sendiri sepanjang sejarahnya selalu menjadi wacana kontroversi baik sebagai kerangka pemikiran maupun gerakan.

Dalam dunia muslim, hampir semua gerakan Islam telah menempatkan ideologi dalam posisi dan fungsi yang sangat penting. Gerakan-gerakan Islam seperti *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, *Jama'at Islam* di Pakistan, dan gerakan-gerakan Islam di Indonesia seperti Syarikat Islam dan Masyumi, lahir dan tidak lepas dari ideologi.⁶ Pandangan yang mempertautkan Islam sebagai ideologi, dalam makna Islam sebagai agama yang menyeluruh menyangkut segenap aspek kehidupan termasuk politik dan memproyeksikan Islam itu secara langsung atau integral dengan kehidupan politik atau negara.

Kelompok Islam yang membangkitkan kembali label formal Islam dan penerapan syari'at Islam, tergolong Islam ideologis atau dalam istilah yang belakangan populer disebut Islamisme. Dikatakan Islam ideologis karena watak dan orientasi keagamáannya berbasis pada pandangan Islam sebagai ideologi, yang mempertautkan secara langsung hubungan Islam dengan negara atau politik serta memperjuangkan cita-cita politik Islam.⁷ Islamisasi harus dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan politik. Bagi kaum Islamis, keterlibatan dalam politik berpijak pada Islam sebagai sistem pemikiran yang umum dan menyeluruh (*Islam is a global and synthesizing system of thought*), masyarakat Islam dalam berbagai landasan dan struktur kehidupannya haruslah Islami.⁸

Dalam konteks Indonesia, fenomena diatas terjadi pada wilayah pemaknaan pada tingkat implementasi isu dan simbol. Kalangan Islam politik meyakini bahwa harus diwujudkan secara simbolik dalam politik, sedangkan kalangan Islam substantif menentang kehadiran partai Islam dan simbolisasi syari'at oleh Negara. Kalangan

Islam substantif atau liberal (kebanyakan kalangan muda yang bergabung dalam JIL) menolak seluruh bentuk perjuangan yang hendak melegalformalkan Islam dalam politik. Bagi kelompok ini, usaha simbolisasi syariat akan mengancam integrasi dan sekaligus mencemarkan makna hakiki agama. Pencampuran antara agama dengan politik, tidak saja keliru dan salah tetapi juga agama hanya sekedar dijadikan alat untuk meraih kepentingan politik kaum elit. Sebaliknya, kalangan yang memperjuangkan syariat (formalisasi/symbolisasi) berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang integratif, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, antara dunia dan akhirat dan pemisahan dalam bentuk apapun. Oleh kalangan ini, mereka yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk sekuler.⁹

Fenomena Islamisme dan Demokrasi Pasca Reformasi

Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh nabi Muhammad SAW, Alquran dan Sunah merupakan sumber atau pedoman bagi umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga, umat Islam (juga non Islam) pada umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrument ilahiah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang lebih dari sekedar agama, untuk itu pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan. Bagi Hassan Hanafi, bahwa term "Islam" yang umum harus dimaknai sebagai "sebuah agama tertentu". Menurutnya, term ini sebaiknya diganti dengan term 'pembebasan' (*taharrur*) sebagaimana disimbolkan dalam syahadat. Menurutnya lagi, 'Islam' berarti pembebasan kesadaran manusia dari kekuatan-kekuatan tiran. 'Islam' memang juga bermakna "penyerahan", tetapi makna tersebut telah dimanipulasi oleh kaum elit menjadi "penyerahan" kepada penguasa sebagai implementasi dari penyerahan kepada Tuhan. Karena itu, Hanafi lebih menekankan pada makna lain dari kata "Islam", yakni "protes, oposisi, dan revolusi".¹⁰ Dari pemekanaan tersebut maka Islam banyak dipandang lebih dari sekedar agama, maka menimbulkan beberapa bentuk aktivisme Islam yang sering disebut dengan Islamisme.

Islamisme merupakan deskripsi Barat, yang menjelaskan tentang bentuk aktivisme Islam yang muncul paa seperempat awal abad ke-20. Dalam pemaknaannya, Islamisme memiliki empat ciri: pertama, mengusung kebangkitan Islam sebagai basis reformasi masyarakat; kedua, memahami Islam sebagai ideologi; ketiga, memiliki tujuan mendirikan sistem Islami atau negara Islam (*al-nizham al-Islami*); keempat, baginya, ciri negara atau sistem politik negara adalah penerapan syariah (berdasar pada hukum Islam).¹¹

Oleh Hasan Al-Banna, gerakan Islam yang selalu berpandangan bahwa Islam adalah bagian integral dalam politik atau negara disebut dengan "*Islamiyyah*" (Islamiyah). Sedangkan dalam wacana kontemporer dikenal dengan "*Islamism*" (Islamisme). Para Islamiyah disebut "*Islamiyyun*", sedangkan pengikut Islamisme disebut "Islamis". Islamiyah dalam makna mutakhir (kontemporer) sebagaimana diperkenalkan para sarjana Barat yang mempelajari Islam dan fenomena gerakan-gerakan fundamentalisme Islam, sepadan dengan istilah atau konsep "Islamisme" (*Islamism*). Islamisme merupakan fenomena gerakan Islam kontemporer yang memandang Islam sebagai ideologi politik, termasuk yang membawa kecenderungan neo-fundamentalisme yang sangat peduli pada syariat Islam.¹²

Dalam pandangan lain, Islamisme diartikan sebagai sebuah keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atauran sosial.¹³ Dimanapun kaum Islamis berusaha mengganti aturan sosial-politik yang ada dengan norma atau ajaran yang didasarkan tafsir tertentu atas ajaran Islam. Usaha-usaha tersebut bisa ditempuh melalui aksi-aksi atau gerakan damai ataupun kekerasan tergantung oleh sistem nilai yang diyakini oleh aktor-aktor gerakan Islamis tersebut. Lebih lanjut, bahwa Islamisme (orientasi politik Islamis) merupakan sesuatu yang krusial dalam mendefinisikan sejauhmana seorang muslim di anggap Islamis atau tidak. Beberapa ahli tentang masyarakat muslim, seperti Lewis dan Gellner, ataupun sarjana ilmu politik, seperti Huntington dan Kedourie, mencoba membuktikan bahwa Islamisme merupakan hal universal bagi kaum Muslim. Bagaimana mengukur Islamisme, satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah mengetahui bagaimana para ideolog Islamis mendefinisikan Islam sebagai Ideologi sosial politik. Bagi Bubalo dan Fealy, tujuan akhir Islamisme itu sendiri adalah pendirian negara atau sistem Islam.¹⁴ Meskipun demikian, gerakan Islamisme itu sendiri tidaklah monolitik. Ada beberapa faksi di dalam Islamisme, tapi tujuannya sama, yakni mendirikan negara Islam, atau setidaknya sistem yang berdasarkan ideologi Islam.

Kalau ditelusuri secara saksama, eksistensi gerakan ini sebenarnya sejalan dengan gerakan revivalisme Islam yang dipertautkan dengan gerakan kebangkitan Islam yang dipelopori oleh Ibn Taimiyyah, Muhammad Abduh, Muhammad bin Abd. Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rasyid Ridha di dunia Islam, yang kemudian masuk dan berkembang di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Di Indonesia, seiring dengan berkembangnya kehidupan perpolitikan nasional ketika memasuki era reformasi, jalur-jalur demokrasi dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam berbagai proses politik secara sukarela. Era reformasi juga memasuki babakan baru dengan mendatangkan liberalisasi politik. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai-partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Islam juga mengambil bagian yang besar dalam era demokratisasi tersebut. Buktinya, bahwa di antara organisasi-organisasi politik yang muncul itu adalah partai-partai yang mempunyai *social origin* Islam. Partai politik pun mulai "kembali menemukan momentum" dirinya untuk memikat masyarakat. Simbol-simbol agama mulai kembali menjadi "komoditas" yang dianggap mampu meningkatkan perolehan suara. Sebagai kelanjutan dari asal-usul sosial demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan asas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa secara jelas pendukung partai-partai itu, baik yang menyatakan secara resmi partai Islam atau tidak, adalah komunitas Islam.

Dalam konteks Islam, perkembangan ini telah melahirkan penilaian tersendiri yakni pandangan mengenai munculnya kembali kekuatan politik Islam. Pandangan ini dianggap boleh saja, karena satu hal yang harus diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak, kenyataan ini akan mempunyai implikasi politik. Dengan kata lain, kekuatan politik apapun, lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhitungkan realitas demografis seperti itu. Artinya,

bahwa massa Islam bakal diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik guna mencari dukungan. Meskipun dalam wilayah tertentu, artikulasi (pemikiran politik Islam) masih tetap didominasi oleh kemahuan ideologis untuk melegitimasi rezim-rezim masyarakat Islam dewasa ini.¹⁵

Pada sisi yang lain, bahwa di era baru itu bukan hanya lahir partai-partai politik yang mengusung politik aliran baik dari kalangan Islam maupun golongan masyarakat lainnya, tetapi juga organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan keagamaan yang membawa misi dan simbol-simbol keagamaan termasuk di kalangan umat Islam. Beberapa gejala baru yang menonjol dan menimbulkan kontroversi ialah gerakan Islam yang mengusung kembali piagam Jakarta dan penerapan syariat Islam yang sering disebut berhaluan radikal atau fundamentalis seperti Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Penegakan Syari'at Islam (KPPSI), dan lain-lain di luar partai politik Islam yang mengusung isu yang sama kendati tidak sekuat gerakan-gerakan Islam berhaluan militan itu. Dalam melakukan usaha-usaha penerapan syariat Islam di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan daerah-daerah lainnya, beberapa diantaranya telah berhasil bahkan ada yang menadapatkan otonomi khusus seperti Aceh.

Dalam konteks Islamisme, kehadiran partai-partai politik dan organisasi Islam bercorak Islamis atau ideologis di era reformasi tersebut telah secara terbuka menyuarakan dan mengusung kembali perjuangan menegakkan syari'at Islam melalui isu momentum amandemen UUD 1945 seperti disuarakan oleh PPP, PBB, dan PK (PKS) maupun oleh KPPSI dan Hizbu Tahrir melalui perjuangan politik parlemen mahupun di luar parlemen. Bagi mereka, keyakinan akan otentitas dan kesempurnaan ajaran Islam dengan tetap mengacu kepada pengalaman sejarah generasi Islam awal. Generasi ini merupakan basis ideologis pandangan kalangan yang kukuh mempertahankan dan memperjuangkan syariah Islam sebagai penawar atas soal sosial-politik masyarakat. Barat dinilai gagal mensejahterakan tatanan sosial-politik penduduk dunia. Pada akhirnya kaum Islamis selalu mengatakan bahwa "syariah Islam adalah solusi" atas berbagai masalah sosial-politik dunia selama ini. Dalam masyarakat baru sekalipun yang hidup disekitar lingkungan Islam akan menyukai pengetahuan Islam karena Islam akan tetap memberikan jalan keluar.¹⁶

Di lingkungan umat Islam, selain partai-partai politik berasas formal Islam sebagaimana disebutkan, lahir pula gerakan-gerakan Islam yang mengusung cita-cita ideologi Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kedua-duanya mengusung perjuangan menegakkan syariat Islam dan kekhalifahan Islam. Sedangkan Gerakan-gerakan Islam lainnya seperti Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan dan kelompok-kelompok Islam lainnya. Gerakan-gerakan Islam ini, baik yang bergerak langsung di lapangan politik menjadi partai politik maupun no-partai politik yang bercorak dakwah dan ideologis, memiliki keturunan ideologis yang relatif sama dan bahkan hingga batas tertentu mempunyai pertautan elite dan pahamnya dengan gerakan-gerakan Islam yang mengusung ide negara Islam atau Islam sebagai dasar negara di masa silam. Hal inilah yang melahirkan kecenderungan Islam yang berorientasi pada politik yang mewarnai kebangkitan kembali Islamisme maupun Islam politik di era baru yang membuka keran keterbukaan luar biasa besarnya. Situasi politik yang

berkembang saat sekarang ini sangat mempengaruhi eksistensi gerakan Islam Ideologis (*Islamisme*). Bahwa iklim keterbukaan pada era reformasi memberikan peluang bagi umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk memperjuangkan aspirasinya pada ruang yang sangat luas.

II. Islamisme dan Demokratisasi di Indonesia pasca Reformasi

Istilah Islamisme selama ini sebenarnya telah banyak dielaborasi dalam berbagai istilah dalam gerakan-gerakan Islam saat ini khususnya di Indonesia. Secara umum bahwa dalam tulisan ini akan mempresentasikan sikap gerakan Islamis di sebagian besar dunia Islam dan Indonesia secara khusus. Bagaimanapun, istilah “Islamisme” tidaklah cukup untuk menilai sebuah tipe gerakan, kecuali dengan karakter khusus sebagai berikut. Pertama, para pendukungnya percaya bahwa Islam harus diimplementasikan secara tekstual sebagaimana diperintahkan al-Quran dan Hadits, tanpa kompromi. Mereka percaya bahwa Islam satu-satunya solusi bagi krisis yang melanda umat Islam karena Islam dipercaya sebagai agama yang lengkap, yang dapat diaplikasikan di setiap zaman dan tempat (salih likulli zaman wa makan).¹⁷ Kedua, mereka cenderung bersikap reaktif terhadap apapun yang mereka anggap sebagai bentuk penyelewengan Islam dan berusaha mengembalikannya kepada Islam versi mereka sendiri. Mempunyai sistem kepercayaan berbeda dengan yang lain, beberapa kelompok Islamis – khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok melioris-kemungkinan tidak bersikap resisten terhadap stautus quo. Mereka melihat komunitas Muslim yang menyimpang adalah lahan untuk kemudian dikembalikan ke versi Islam yang “otentik” melalui pendekatan persuasif dan damai.¹⁸

Dengan karakteristik tersebut, maka tidak dapat mendefinisikan secara jelas garis pemisah antara Islamisme damai dengan kelompok Islamisme radikal. Dalam konteks ini, Greg Fealy berpendapat bahwa Islamisme tidak dapat ditempatkan dalam satu kategori terpisah, dan dengan begitu berbeda dari muslim “Moderat” atau “liberal”.¹⁹ Realitanya, Islamisme adalah rangkaian kesatuan tanpa batas yang membuat batasan antara Islamisme dan “Islam moderat” menjadi kabur. Dalam kata lain, pemikiran Islamis bisa dengan mudah berdampingan dengan muslim “moderat” dalam masalah tertentu dan mendapatkan gaungnya di kalangan organisasi Islam *mainstream* seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Di luar reputasi mereka sebagai organisasi “moderat”, beberapa bagian dari organisasi ini bersimpati kepada agenda utama kelompok Islamis. Oleh karenanya pendapat organisasi ini kadangkala sama dengan pendapat kelompok Islamis.²⁰

Kalau dilihat dari sisi metode gerakan, Islamisme di zaman pasca-orde baru mengambil dua bentuk manifestasi; bentuk pertama dimanifestasikan dengan perjuangan struktural untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan umum. Sampai di sini, beberapa partai politik dengan Islam sebagai landasan dan semangatnya telah dibentuk Indonesia dengan agenda utama menegakkan syariat Islam. Berkembangnya partai Islam setelah tahun 1998-dengan PBB (Partai Bulan Bintang), PUI (Partai Umat Islam), dan PKS (partai Keadilan Sejahtera) sebagai partai utama-tidak dapat dilepaskan dari manifestasi tersebut. Biasanya anggota partrai tersebut memfokuskan diri untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 atau mengusulkan penerapan shariah Islam di level negara. Di sisi yang lain

ketika fenomena pembentukan Peraturan daerah (perda) berbasis syariah yang didukung partai Islam di beberapa daerah adalah menjadi contoh bagaimana partai-partai ini beroperasi di level daerah dan dianggap cukup berpengaruh..

Adapun bentuk kedua bagaimana Islamisme memmanifestasikan dirinya adalah melalui aktivitas sosial budaya di luar pentas politik formal. Organisasi Islamis seperti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbu Tahrir Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), laskar Jihad dan sejenisnya memrepresentasikan Islamisme tipe ini.²¹ Jatuhnya rezim orde baru memicu munculnya karakter organisasi seperti ini, di mana mereka memanfaatkan kelemahan negara untuk meraih kekuasaan. Dua manifestasi Islamisme yang disebutkan di atas sama-sama berjuang untuk menciptakan masyarakat berbasis hukum/formalisasi syariah.

Adapun di luar perbedaan dalam hal artikulasi, dua manifestasi Islamisme di atas mempunyai karakteristik yang sama. Yang paling utama, mereka menggunakan Islam sebagai rujukan atas aktivitas yang mereka lakukan, dan menyebut mereka sendiri sebagai "islami". Kedua, mereka juga mempunyai tujuan yang sama untuk menyebarkan Islam di semua level melalui penerapan syariah Islam. Meskipun mereka sepakat tentang ide Islamisasi negara dan masyarakat, mereka berbeda satu sama lain tentang metode bagaimana proses Islamisasi dilaksanakan di level praktis. Walaupun antagonisme di antara keduanya terkadang muncul dipermukaan, perbedaan dalam metode tersebut biasanya dipahami sebagai perbedaan minor dalam rangka memperjuangkan tujuan yang sama: penerapan syariah Islam di semua level. Manifestasi Islamisme pertama menggunakan politik intra-parlementer (menjadi bagian dari sistem partai politik yang ada) sebagai cara Islamisasi negara dan masyarakat, sedangkan manifestasi Islamisme kedua menggunakan politik ekstra-parlementer (di luar sistem partai politik formal) sebagai cara untuk memperjuangkan tujuan yang sama dalam hal visi.

Ide gerakan yang berbasis ideologi sangat memungkinkan adanya pengaruh yang signifikan dalam struktur kekuasaan ataupun dalam konstalasi politik negara. Perjuangan yang berbasis gerakan sosial (Islam) ini baik yang berada di wilayah ekstra parlementer maupun di intra-parlementer sama-sama mempunyai visi 'politik' baik langsung maupun tidak langsung. Gerak-gerakan kolektif yang mereka lakukan dianggap sangat mempengaruhi proses demokratisasi. Massa yang militan dan beberapa elit mereka baik yang berada dalam struktur kekuasaan formal negara maupun yang tidak masuk dalam struktur kekuasaan formal negara adalah satu bentuk atau bukti bahwa mereka kaum Islamis ini telah jauh berada dalam konstalasi politik dalam mempengaruhi kebijakan negara.

III. Kesimpulan

Dalam beberapa hal, uraian di atas menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, fenomena kebangkitan Islam merupakan upaya koreksi umat Islam atas sejarahnya sendiri yang ketika itu tidak lagi bersesuaian dengan masa lalunya yang gemilang dan ternyata juga tidak mampu berhadapan dengan peradaban modern (karena bersentuhan dengan Barat dan masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi modern). Seperti ungkapan Yusril, fenomena tersebut menunjukkan, bahwa Islam selalu menampilkan dirinya ke dalam wajah-wajah yang berbeda sepanjang sejarah

masyarakat pendukungnya.²² Baginya hal ini logis saja mengingat Islam sebagai doktrin yang universal,-secara internasional-memiliki dinamika di dalam dirinya sendiri. Hal tersebut senantiasa terbuka untuk ditafsirkan ulang sejalan dengan perubahan zaman.

Kedua, Gerakan Kebangkitan Islam itu juga tumbuh dalam konteks dominasi politik Barat terhadap dunia Islam. Selanjutnya bahwa persentuhan kaum muslimin dengan peradaban Barat modern tersebut mau tidak mau juga memunculkan fenomena modernisasi baik dalam pengertian konseptualnya maupun secara sosial. Gerakan Kebangkitan Islam dalam hal ini dapat dipahami sebagai respon atau reaksi atas modernisasi. Dalam konteks ini pula, kebangkitan Islam dapat dipahami sebagai upaya memajukan masyarakat Islam (menjadi modern) atau sebagai upaya menjaga agar nilai-nilai modernisasi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga, gerakan Islamis di Indonesia sangat dinamis dalam berbagai varian gerakan. Islamisme telah menjadi ideologi tersendiri dengan karakternya yang khas. Gerakan Islamis baik yang ada pada wilayah intra maupun ekstra-parlementer tetap akan sangat berpengaruh dalam proses politik di Indonesia utamanya dalam pertumbuhan demokratisasi.

Oleh karena itu, perlu kesadaran tersendiri bagi umat Islam bahwa demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan rakyat, hendaknya jangan diperhadapkan dengan kedaulatan Tuhan, sebab rakyat atau manusia ini juga ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, maka kedaulatan manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk berkehidupan yang layak. Munculnya gerakan Islamis adalah bukti bahwa kebangkitan Islam dalam berbagai variannya telah banyak berpengaruh dalam proses demokratisasi di Indonesia.

¹ Azyumardi Azra menunjukkan bahwa Islam di Indonesia dengan pusat-pusat dunia Islam memang telah memiliki jaringan sejak lama, terutama sejak abad ke-17 dan 18. Sehingga perkembangan-perkembangan di pusat-pusat Islam tersebut dapat diketahui dan berkembang pula di Indonesia. Lihat Azyumardi Azra, 1995. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan.

² Kuntowijoyo, 1993. Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan. Hlm. 195.

³ Ibid.

⁴ Deliar Noer, 1996. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

⁵ Bahtiar Effendi (2001), *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta, Galang Press. h. 29

⁶ Islam sebagai ideologi (*Islamic Ideology*) didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa Islam sebagai agama yang bersifat universal ("*Islam as a universal religion*"), berdasar pada anggapan bahwa Islam adalah azas yang sempurna.

⁷ Islamisme (Gerakan Islam ideologis) dapat dilihat pada konteks partai-partai Islam dan gerakan-gerakan Islam non-partai politik.

⁸ Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy; Piety and Pragmatism*. Meskipun dalam perkembangannya Islamisme ini sering disejajarkan dengan marxisme.

Islamisme kenapa kemudian banyak orang tertarik karena dasar gerakannya adalah berangkat dari fenomena sosial-politik suatu negara yang banyak bermasalah sehingga Islamisme kemudian menawarkan suatu solusi kebangsaan dengan menawarkan penegakan syariah sebagai solusi. Sama halnya dengan banyaknya orang yang tertarik dengan ideologi marxis karena marxisme menawarkan sebuah teori keadilan, bahwa kapitalisme harus dilawan demi terwujudnya keadilan sosial dalam suatu negara. Lalu kenapa kemudian Islamisme dibenci oleh sebahagian kalangan karena Islamisme ini dianggap memaksakan kehendak dan tidak menghormati pluralisme. Contohnya adalah kritik terhadap formalisasi syariah. Syariah tidak boleh dipaksakan masuk pada wilayah kebijakan negara karena itu adalah ruang publik (*public sphere*). Untuk lebih jelasnya lihat, Peter Baehr, *Marxism and Islamism: Intellectual Conformity In Aron's time and Our Own*, *Journal Of Classical Sociology* (2011) 11: 173

⁹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. h. 200.

¹⁰ Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2004. h. 226.

¹¹ Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason. 2012. *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*. Terjemahan oleh Syamsu Rijal, PKS dan Kembarannya; *Bergiat jadi demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Jakarta, Komunitas Bambu. H.5

¹² Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at; reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta 2007. Meskipun dalam berbagai kesempatan kaum Liberal menyoroti Islamisme. Bagi mereka Islamisme adalah sebuah gerakan yang menyalahi konsep politik modern. Islamisme sama halnya dengan kaum Fasisme yang telah menjadi musuh terhadap demokrasi dan kebebasan. Lebih jelasnya lihat, Arun Kundnani, *Islamism and the Roots Of Liberal Rage*, *Race Class* 2008, Vol. 50(2): 44-45

¹³ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS; Suara dan Syariah*, Gramedia, Jakarta. 2012. Hal. 48.

¹⁴ Bubalo dan Fealy, *Joining the Caravan?* Jakarta, 2005. hal.9

¹⁵ Bahtiar Effendi (2001), *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Galang Press, Yogyakarta. h. 52.

¹⁶ Burhan Ghalioun, (2010), *Islamology Comes to Aid of Islamism*, *DIOGENES* 226:120-126

¹⁷ Masdar Hilmy, "Looking into God's Heaven: Theological Constructs of Islamic Radicalism in post New Order Indonesia," *Asian Cultural Studies* 15 (Special Issue, 2006), hal.11-23.

¹⁸ Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus di Indonesia Pasca Orde Baru*. Kanisius, Yogyakarta:2009. h.24

¹⁹ Greg Fealy, *Islamic radicalism in Indonesia: The Faltering revival*, *Southeast Asian affairs* 2004 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), hal. 104-121.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 105

²¹ Michael Davis, "Laskar Jihad and the Political Position of Conservative Islam in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 24, No. 1 (April 2002), hal. 12-32.

²² Yusril Ihza Mahendra, 1995. *Keharusan Demokrasi? Komentor Terhadap Facchry Ali*, dalam *Ulmul Qur'an* No. 1 Vol. VI Th. 1995.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Salam Sidahmed and Anoushiravan Ehteshami. (ed.). 1996. *Islamic fundamentalism*. Westview Press.
- Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason. 2012. *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*. Terjemahan oleh Syamsu Rijal, PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki. Jakarta, Komunitas Bambu.
- Anthony Oberschall. 1973. *Social conflicts and social movement*. New Jersey: Prentice Hall.
- Anhar Gonggong. 2004. *Abdul Qahhar Muzakkar dari patriot hingga pemberontak*. Yogyakarta: Ombak.
- Azyumardi Azra. 1996. *Pergolakan politik Islam dari fundamentalisme, modernisme, hingga Post-modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Bernhard Platzdasch. 2009. *Islamism in Indonesia; Politics in the emerging democracy*. Singapore.
- Bahtiar Effendi. 2000. *Repolitikasi Islam; pernahkah Islam berhenti berpolitik?*. Bandung: Mizan.
- Burhanuddin Muhtadi. 2012. *Dilema PKS; suara dan syariah*. Jakarta: Gramedia.
- G.H. Jansen. 1980. *Islam Militan; Sebuah uraian dan analisis yang tajam tentang konfrontasi antara Islam dengan barat saat ini*. Terjemahan, Militant Islam; An informed and incisive analysis of Islam's confrontation with the western world today. Bandung: Pustaka.
- Greg Fealy, 2004. *Islamic radicalism in Indonesia: The Faltering revival,*" Southeast Asian affairs 2004 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Haedar Nashir. 2007. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi salafiyah ideologis di Indonesia*, Jakarta: RMBOOKS.
- Muhammad Rahmat Imdadun. 2003. *Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980-2002: Studi atas gerakan tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia*. Tesis Master, Universitas Indonesia.
- Nazih Ayubi. 1991. *Political Islam; religion and politics in the Arab world*. London: Routledge.
- John Calvert. 2008. *Islamism: A documentary and reference guide*. India: Green Wood Press.
- John L. Esposito, (ed.). 1997. *Political Islam; revoultion, radicalism, or reform?*. London: Lynne Rienner, Inc.
- John L. Esposito. 1990. *Islam dan Politik*, Terjemahan, Jakarta: Bulan Bintang.
- Masdar Hilmy .2010. *Islamism and Democracy in Indonesia; piety and pragmatism*, Singapore.
- Olivier Roy. 1994. *The Failure of Political Islam*. London: I.B. Tauris Publishers, London.
- Peter R. Demant. 2006. *Islam vs Islamism: the dilemma of the muslim world*, London.
- Laura Guazzone. 1995. *The Islamist Dilemma; the political role of Islamist movement in the Arab world*, UK: Ithaca Press, UK.
- Samuel P. Huntington. 1996. *The Clash of Civilizations and the remaking of world order*, New York.

-
- Samuel Graham Wilson. 1976. *Modern Movemets Among Moslems: scholarly resources*. Inc, New York.
- Saiful Mujani. 2007. *Muslim Demokrat; Islam Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia.
- Taufik Abdullah. 1987. *Islam dan Masyarakat: pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- The Emirates Center for Strategic Studies and Research. 2003. *Islamic Movements; impact on political stability in the Arab world*. Abu Dhabi.

Jurnal:

- Burhan Ghalioun. 2010. Islamology Comes to the Aid of Islamism, *Diogenes*, 257: 120.
- Daniel Pipes. 2000. Islam and Islamism: Faith and Ideology, *The National Interest*, Washington. 87-93.
- Hussin Muthalib. 1990. Islamic Revivalism in ASEAN States: Political Implication, *Asian Survey*, Vol. 30, No.9. 877-891.
- William I. Robinson. 2010. Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*. 39: 187
- Peter Baehr. 2011. Marxism and Islamism: Intellectual conformity in Aron's time and our own. *Journal of Classical Sociology*. 11:173.
- Arun Kundnani. 2008. Islamism and the roots of liberal rage, *Race Class*, 50: 40
- Chistopher Houston, 2004, *Islamism, Castoriadis and Autonomi* Number 76. SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi). 49-69.
- Ali Riaz. 2004. *God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh*. Lanham, MD: Rowan and Littlefield. pp. 23.